



Jurnal Islamika Granada

Available online <https://penelitimuda.com/index.php/IG/index>

Pembaharuan Pendidikan Islam Multikulturalis

Renewal of Multiculturalist Islamic Education

Fikriyah Iftinan Fauzi*

Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding author: fikriyahiftinanfauzi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa bahasa multikulturalisme merupakan bahasa yang indah namun penerapannya cukup susah. Kecuali, jika pengajaran “yang menghargai perbedaan” di dalam pendidikan Islam bertumpu, tidak hanya pada konsep “pendidikan Islam multikulturalisme” yang mendalam, tapi juga pada aspek seleksi input muridnya. Kesimpulan tersebut berbeda dengan kajian terdahulu yang mendeteksi bahwa multikulturalisme dapat diterapkan dalam system pendidikan, dan bahan ajar. Metodologi penulisan makalah ini berbasas pada faham menghargai perbedaan (konsep multikulturalisme) yang tetap menghargai adanya kelompok mayoritas dan minoritas (teori kritis).

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Multikulturalisme; Pengajaran.

Abstract

This paper resulted in the conclusion that the language of multiculturalism is a beautiful language but its application is quite difficult. Except, the teaching of "respect differences" in Islamic education rests, not only on the deep concept of "islamic education multiculturalism", but also on the aspect of selecting student input. This conclusion is different from previous studies that detected that multiculturalism can be applied in educational systems, and teaching materials. The methodology of writing this paper is based on the understanding of appreciating differences (the concept of multiculturalism) while still respecting the existence of majority and minority groups (critical theory).

Keywords: Islamic Education; Multiculturalism; Teaching.

How to Cite: Fauzi, Fikriyah Iftinan. 2021. Pembaharuan Pendidikan Islam Multikulturalis, *Jurnal Islamika Granada*, 1 (2): 74-83.

PENDAHULUAN

Upaya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, sebagai usaha untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan pengajaran, menyebabkan orientasi pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia mengalami perubahan. Namun, menurut Rahman, Indonesia sebagaimana negara-negara muslim lainnya menghadapi masalah pokok dalam pembaruan pendidikan Islam. Masalah itu menurutnya adalah kelangkaan tenaga guru yang memadai untuk mengajar dan riset, dan bagaimana memproduksi tenaga seperti itu. Karenanya, tak bisa dihindarkan lagi dilakukannya percobaan dalam penyempurnaan materi pelajaran Islam klasik dengan pelajaran modern. Kedua mata pelajaran itu dicampurkan dalam berbagai proporsi, tergantung apakah lembaga pendidikan yang bersangkutan termasuk dalam system pendidikan umum. Pada tingkat pendidikan tinggi, melalui percobaan dengan berbagai lembaga yang disebut universitas Islam di Jakarta dan Yogyakarta yang akan menghasilkan sarjana ilmu keislaman. Kurikulum yang dipakai tampaknya mengikuti pola empat fakultas di Al-Azhar yaitu teologi dan syariah atau hukum Islam, pendidikan dan adab, atau humanika Islam, dengan penekanan khusus pada bahasa Arab. Rahman, mempunyai harapan besar untuk Indonesia, ia menyatakan walaupun sekarang ini pendidikan Islam di Indonesia sangat bergantung pada model Al-Azhar, pasti akan mampu mengembangkan suatu tradisi Islam pribumi yang bermakna, yang akan benar-benar bersifat islami dan kreatif (Rahman, 1982).

Perumusan pemikiran konsep pendidikan Islam yang hendak dikembangkan haruslah dibangun di atas sebuah paradigma yang kokoh spiritual, unggul secara intelektual, dan agung secara moral dengan Al-Qur'an sebagai acuan yang pertama dan utama. Paradigma model inilah, orang boleh berharap bahwa peradaban yang akan datang tidak berubah menjadi kebiadaban yang liar dan brutal (Rahman, 1982). Tawaran kurikulum yang sifatnya terbuka bagi kajian kritis dan ilmu sosial. Rahman, sangat menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analitis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas. Dalam hal ini filsafat berfungsi menyediakan alat-alat intelektual bagi teologi dalam menjalankan tugasnya membangun suatu pandangan dunia berdasarkan Al-Qur'an dan Rahman memandang bahwa penting keterlibatan sains sosial dalam desain pendidikan Islam (Rahman, 1982).

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menyelidiki, mengevaluasi, dan menginterpretasikan topik dan hasil yang menarik dan relevan (Triandini et al., 2019). Literatur review digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan latar belakang teoritis, memperluas penelitian ke topik yang menarik, dan menjawab pertanyaan penelitian yang dibahas (Okoli & Schabram, 2010). Teknik dalam literatur review adalah pengumpulan data, tinjauan, ana-lisis, dan ringkasan data untuk referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan adalah pemikiran, dan usaha-usaha untuk mengubah paham dan adat istiadat, institusi lama untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan faham baru yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nasution, 1989). Pembaharuan adalah proses atau cara membarui yang menghasilkan perubahan dalam penyesuaian situasi dan kondisi (Azra, 2013). Pendidikan Islam adalah proses mempersiapkan generasi muda (pembentukan individu) untuk menjalankan kehidupan (sebagai khalifah) dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien berdasarkan sumber-sumber Islam berupa Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Pendidikan Islam yang sebenarnya adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara pengetahuan wahyu dan pengetahuan usaha manusia sehingga menghasilkan kesejahteraan spiritual dan material (Azra, 2013).

Pembaharuan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan cara pandang intelektualisme dalam mengambil manfaat keilmuan baru untuk mengambil fungsi pendidikan sebagai pembangunan umat (Nasution, 1989). Pembaharuan pendidikan Islam yang dimaksud yaitu modernisasi pendidikan Islam yang terjadi akibat pertemuan Islam dengan Barat dan sebagai tuntutan kebutuhan dunia pendidikan Islam saat ini. Pembaharuan pendidikan Islam pada esensinya adalah pembaharuan pemikiran dan prespektif intelektual, khususnya melalui penerjemahan literatur Eropa yang dipandang esensi ke dalam bahasa Arab, atau melalui pengiriman sejumlah duta dan mahasiswa yang ditugaskan mengenai pendidikan Eropa yang merupakan salah satu rahasia keunggulan mereka. Inti dari pembaharuan pendidikan Islam adalah berupaya meninggalkan pola pikir lama yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman (Azra, 2013).

Perumusan pemikiran konsep pendidikan Islam yang hendak dikembangkan haruslah dibangun di atas sebuah paradigma yang kokoh spiritual, unggul secara intelektual, dan agung secara moral dengan Al-Qur'an sebagai acuan yang pertama dan utama (Rahman, 1982). Namun, Indonesia sebagaimana negara-negara muslim lainnya menghadapi masalah pokok yaitu kelangkaan tenaga guru yang memadai untuk mengajar dan riset. Karenanya, tak bisa dihindarkan lagi dilakukannya percobaan dalam penyempurnaan materi pelajaran Islam klasik dengan pelajaran modern, kedua mata pelajaran itu dipadukan dalam berbagai proporsi (Rahman, 1982).

Arti kata multikultural adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran atau faham). Kultur adalah sebuah budaya yang universal, sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol, kepribadian yang ditulis dengan luas, refleksi dari struktur biologis, dan ekspresi yang tidak terlihat (Muslimah, 2010). Multikultural adalah masyarakat yang terbentuk dari banyak kelompok budaya berdasar pada ciri suku, ras, agama, bangsa, bahasa (Littlejohn & Foss, 2005), dan pendapatan (Lovano-Kerr & Enid, 1977). Claude Levi-Strauss (1908) berpendapat bahwa semua kultur adalah refleksi dari struktur biologis yang universal dari pikiran manusia (Muslimah, 2010).

Istilah multikultural secara tidak langsung menyatakan bahwa masyarakat kita terbentuk dari banyak kelompok budaya yang berdasar pada beberapa ciri diantaranya suku, ras, agama, bangsa, bahasa (Littlejohn & Foss, 2005). Salah satu dimensi dari jenis pluralisme budaya ini adalah kebedaragaman dari perbedaan budaya dalam tiap kelompok seperti perbedaan antara kelompok, yang menggambarkan fenomena dari beberapa individu subkultur yang mungkin berpartisipasi secara utuh, atau terhadap tingkat yang lebih terbatas, pada suatu budaya yang dominan (Lovano-Kerr & Enid, 1977). Adapun Multikulturalisme adalah faham, bahkan politik pengajaran dan nilai keragaman pada tatanan masyarakat plural (Yahya, 2010). Dua istilah tersebut sebenarnya terkait erat dengan dunia pendidikan yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengecualikan (*mutual exclusive*), bahkan dapat dikatakan ibarat dua sisi uang yang berbeda (Yahya, 2010).

Belakangan ini muncul diskusi tentang istilah multikulturalisme dengan interkulturalisme. Multikulturalisme merupakan faham yang ideal namun sulit diterapkan. Multikulturalisme sesungguhnya hanya berperan pada aspek ekonomi dan politik sehingga terjebak pada status quo. Ide interkulturalisme merupakan sebagai temuan aktif dari pergumulan, masalah, kesalahan multikulturalisme (Schechner, 1992). Salah satu masalah yang muncul dalam upaya multikulturalisme adalah keterbatasan unsur mana yang dijadikan dasar kebutuhan budaya politik, apalagi jika itu negara bagian (Haldane, 1993).

Walaupun pengertian kultur sangat beragam, tetapi ada beberapa titik persamaan yang dapat diambil untuk mempertemukan keragaman definisi-definisi tersebut. Karena pada dasarnya, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristiknya. Conrad P. Kottak menjelaskan bahwa kultur memiliki beberapa karakter khusus. Pertama, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. Kedua, kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Ketiga, kultur adalah sebuah symbol. Symbol dalam hal ini umumnya berbetuk linguistik. Keempat, kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuat yang alami. Kelima, kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Keenam, kultur adalah sebuah model. Ketujuh, kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif (Muslimah, 2010).

Multikulturalisme sebenarnya tidak terlepas dari tatanan politik global. Sinyalir bahwa dunia barat yang kini sedang berupaya mengubah tatanan dunia baru agar menjadi "miliknya" mengangkat isu multikulturalisme sebagai tema penting yang ditawarkan dalam mengubah citra masyarakat heterogen. Memang diakui bahwa dalam prinsip pendidikan multicultural, misalnya, pengakuan terhadap perbedaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Hak asasi individu atau kelompok apapun bentuk keunikannya memperoleh tempat yang terhormat di mata multikulturalisme. Dari sinilah kemudian berkembang semangat komunitas yang mencampurkan antara keragaman dengan keagamaan, antara yang eksotik dengan yang esotik.

Setiap keunikan budaya dibiarkan berkembang, namun pada saat yang sama interaksi trans-budaya yang inferior dengan budaya yang superior dapat menyebabkan

semakin lunturnya nilai-nilai budaya pada kalangan minoritas yang cenderung inferior. Karena salah satu elemen pembentuk kebudayaan adalah agama, maka keadaan ini sesungguhnya dapat menggambarkan terjadinya pengikisan nilai-nilai agama secara perlahan (Yahya, 2010).

Pada awalnya, post-strukturalisme adalah sebuah pergerakan yang berasal dari Prancis dalam bereaksi pada ide-ide semiotik tradisional tentang bahasa. Dalam bidang komunikasi saat ini, pakar post-strukturalis yang paling berpengaruh adalah Michel Foucault. Walaupun ia menolak bias strukturalis dalam penelitiannya, tulisan-tulisannya menjembatani tradisi post-struktural dan struktural dalam tradisi kritis. Foucault mengatakan bahwa setiap masa memiliki pandangan yang berbeda, atau susunan konseptual yang menentukan sifat pengetahuan dalam masa tersebut. Karakter pengetahuan dalam sebuah masa disebut oleh Foucault dengan episteme atau formasi diskursif.

Suatu bangsa dipersatukan dengan sebuah budaya yang umum mencakup cabang-cabang budaya, sama halnya ia dapat memenuhi unsur pokok negara. Akan tetapi ada batasan untuk diterapkan dalam kehidupan suatu persatuan negara-negara bagian. Memberikan suatu tanda bagi diskusi berikutnya tidak ada spesifik apriori yang dapat dicegah, akan tetapi secara bersamaan, akibat wajar dari perhimpunan sosial adalah sebuah keterbatasan. Batasan dari multikultural mungkin adalah sebuah perkara yang dibawa ke ranah debat publik persisnya yaitu argumen yang terkait untuk menetapkan –kebutuhan budaya politik dan keberadaan institusi publik yang ada agar terwujud (Haldane, 1993).

Hal ini juga perlu diingatkan bahwa meskipun identitas nasional mungkin menetapkan dasar dari komunitas politik, tidak semua negara yang ada, pada saat yang sama, dengan sejarah suatu bangsa dan tidak semua sejarah suatu bangsa bisa menjadikan dirinya sebagai pondasi bagi pemerintah politik. Ide Haldane yang pertama memuat kritikan tentang hubungan teori dari liberalism secara filosofis; dengan membandingkan kepada objek utama terhadap nasionalisme inilah yang paling mudah dilaksanakan. Pada tingkat yang lebih luas, apakah itu dapat dicapai? Dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan, jika pada keseluruhan, ia menggabungkan prinsip keadilan terhadap siapa yang layak merasakan ancaman dari tirani patriotik yang dipertimbangkan? Pertanyaan terdahulu adalah tentang persoalan sejarah dan pengembangan budaya kedepan, tentang ketiadaan hal yang umum untuk diungkapkan. Yang terakhir, bagaimanapun, ada hal penting tentang aspek filosofis karena lantaran ia dapat digunakan sebagai sebuah keadilan tertinggi suatu bangsa (Haldane, 1993).

Dengan ini dapat diduga bahwa penolakan awal dari liberalism menyisakan ketidakbermaknaan yang memberikan suatu respon terhadap masalah ini –selain dari menolaknya. Tapi jika menengok ke belakang tradisi panjang dari dasar kebenaran filosofis bagi dasar keadilan dengan menunjuk kepada fakta teologis dari dasar manusia. Naturalisme ditambah nasionalisme menawarkan sebuah prospek tentang nilai inti dari nilai moral universal yang dijaga oleh lingkaran terluar dari akar prinsip politik di dalam sejarah lokal. Bukanlah perkara penting tentang pemilihan antara identitas nasional dan keadilan, tapi melihat apa yang dapat dibuat masyarakat civil

suatu bangsa dan nilai politis jika salah satu berfikir bahwa liberalisme politis kontemporer telah terbukti tidak mencukupi.

Secara historis, pendidikan Islam tidak sesempit yang dipahami oleh segelintir orang, yakni adanya di antara mereka memahami pendidikan Islam hanya berkisar pada pendidikan rohaniah semata, tanpa menyentuh pendidikan yang sifatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula bahwa sangatlah tidak tepat anggapan yang mengatakan Islam itu sangat eksklusif dan tertutup, tidak siap menerima perbedaan dan keragaman. Oleh karena itu untuk menilai Islam, seseorang harus memahi Islam secara sempurna atau secara kaffah. Dari segi historisnya misalnya, Islam telah mempraktekkan hidup rukun dalam keragaman, nabi SAW Membangun Yasrib yang kemudian menjadi pusat pemerintah, yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Madinah yang terdiri atas keragaman etnis dan latar belakang agama dan kepercayaan, nabi menerapkan konsep Al-Qur'an tidak memaksakan umat non-Islam untuk terjadinya konversi ke Islam. Dengan ikhlas umat Islam membangun kebersamaan yang plural di Madinah, namun karena ulah kaum Yahudi dari Bani Nadhir, maka nabi kemudian memerintahkan mengusir mereka dari Madinah (Yahya, 2010).

Secara filosofis, gagasan penerapan multikulturalisme perlu dilandasi pengetahuan yang berupa konsep-konsep relevan dan mendukung keberadaan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dan perbedaan yang sederajat, suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, dominan privat dan publik, dan hak asasi manusia (Yahya, 2010). Secara politis, isu multikulturalisme tidak terlepas dari tatanan politik global. Sinyalir bahwa dunia barat yang kini sedang berupaya mengubah tatanan dunia baru mengangkat isu multikulturalisme sebagai tema penting yang ditawarkan dalam mengubah citra masyarakat heterogen. Memang diakui bahwa dalam prinsip pendidikan multikultural misalnya, pengakuan terhadap perbedaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Hak asasi individu atau kelompok apapun bentuk keunikannya memperoleh tempat yang terhormat di mata multikulturalisme (Yahya, 2010).

Salah satu elemen pembentuk kebudayaan adalah agama, maka keadaan ini sesungguhnya dapat menggambarkan terjadinya pengikisan nilai-nilai agama secara perlahan (Yahya, 2010). Akan tetapi dalam konteks Islam, multikulturalisme tidak berseberangan dengan nilai-nilai agama. Risalah agama diturunkan kepada umat manusia untuk mengembangkan cita-cita luhur, sebagai panduan ilahiyah bagi perwujudan tatanan makhluk yang damai, penuh rahmat, harmonis, adil dan sejahtera. Secara ideal tidak ada masalah dalam ketentuan normatif agama, semua berujung pada kebaikan universal, baik dalam relasi vertikal antara manusia dengan Allah (hablun min Allah), maupun dalam relasi horizontal sesama manusia (hablun min al-nas), baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun secara faktual, tidak jarang, agama justru menjadi dalih untuk memicu konflik, atau minimal menjadi sumber pembenaran atas berlangsungnya sengketa berdarah. Sampai-sampai sebagian sosiolog berpendapat, bahwa agama disamping berfungsi sebagai pemersatu, juga pemecah belah, seperti

misalnya faktor fanatisme agama yang menjadi pemicu terjadinya perang salib (yang banyak merugikan kedua belah pihak).

Dari aspek pendidikan, rekomendasi UNESCO berpesan; pertama bahwa pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain (Muslimah, 2010). Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagai dan memelihara (Muslimah, 2010). Salah satu upaya ke arah tersebut adalah melalui pendidikan multikulturalis. Dalam konteks pendidikan umum, pembaharuan pendidikan multikulturalis dilakukan melalui multidimensi. Ia didesain untuk menyediakan guru ke depan dengan sebuah pengetahuan yang berdasar pada beberapa dimensi berikut: (1) pengetahuan sejarah sosial, (2) pengetahuan psikologi sosial, (3) pengetahuan antropologi, (4) pengetahuan estetis, (5) kompetensi mengajar, dan (6) penilaian kepribadian.

Program pengembangan pendidikan multikultural terdiri dari sebuah inti dari mata pelajaran pendidikan dasar khusus dengan sebuah fokus multikultural dan bagian dari pengalaman komunitas yang luas. Proyek ini berdasar pada filsafat pendidikan bahwa pendidikan multikultural adalah bagus untuk setiap orang dan menyediakan kesempatan khusus untuk berpartisipasi dalam pengalaman belajar yang secara kultur sangat beragam. Supaya dapat memanfaatkan pengetahuan dan mampu mendesain, mengajar, dan mengevaluasi pengalaman pendidikan multikultural membutuhkan murid yang berbeda latarbelakang budayanya, program ini menyediakan tiga komponen pengalaman umum: (1) pengalaman kelas, (2) pengembangan bahan pembelajaran, dan (3) pengalaman lapangan (Lovano-Kerr & Enid, 1977).

Merujuk pada pesan dan program tersebut, maka konsep dan praktik pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani. Maka untuk menuju masyarakat madani, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih salah satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan umum atau mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif, misalnya mempersiapkan para ulama dan mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia (Yahya, 2010).

Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern,

sehingga dominasi pendidikan yang terkategori maju dan berperadaban modern didominasi oleh pendidikan di Barat yang konotasinya non-muslim. Sehingga diperlukan konsep pendidikan Islam yang mampu menjawab seluruh tantangan yang kini telah mengglobal, serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana dan prasarana. Lembaga-lembaga pendidikan harus mampu memenuhi keinginan untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat untuk menimba ilmu umum dan ilmu agama serta keterampilan. Tetapi kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan model yang telah dilakukan lembaga-lembaga pendidikan umum yang diterapkan di lembaga Islam sehingga akibatnya beban kurikulum yang terlalu banyak dan cukup berat dan bahkan terjadi tumpang tindih (Yahya, 2010).

Selain dua hal di atas, tawaran kurikulum yang sifatnya terbuka bagi kajian-kajian filsafat dan sains sosial. Rahman, sangat menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analitis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas. Dalam hal ini filsafat berfungsi menyediakan alat-alat intelektual bagi teologi dalam menjalankan tugasnya membangun suatu pandangan dunia berdasarkan Al-Qur'an. Rahman memandang bahwa penting keterlibatan sains sosial dalam desain pendidikan Islam (Rahman, 1982).

Pengajaran multikultural adalah sebuah area yang konsen pada bidang pendidikan yang tepat karena berasumsi bahwa beberapa kelompok yang berbeda secara kultur dari kelompok dominan adalah keniscayaan. Ide ini mengembangkan, mengesahkan, dan menyebarkan kepada seluruh peserta sebuah pernyataan tentang pendidikan multicultural (Lovano-Kerr & Enid, 1977). Pengajaran guru menjadi salah satu penerapan konsep tentang pluralisme budaya. Implementasi pluralisme budaya ini harus menjadi bagian integral dari pengajaran guru. Ia dibutuhkan tidak hanya mata pelajaran khusus atau pengalaman pembelajaran khusus yang melekat pada program reguler juga ia dapat menyerap semua aspek dan semua level dari pengajaran guru. Untuk kebermaknaan yang sesungguhnya, kegiatan belajar mengajar multikultural bagi guru diharapkan meliputi partisipasi aktif dalam perbedaan pengalaman belajar tentang multikultural (Lovano-Kerr & Enid, 1977).

Menurut Sayyid Quthb, materi pendidikan (pelajaran harus mampu menstimulir fitrah peserta didik, baik itu fitrah rohani, akal dan perasaan, sehingga memberikan corak serta sekaligus mewarnai segala aktivitas hidupnya di muka bumi, baik sebagai khalifah fi al-ardh maupun sebagai hamba. Bentuk materi pelajaran yang demikian akan mampu menghasilkan sosok peserta didik sebagai manusia seutuhnya (al-insan kamil). Selanjutnya dalam kaitannya dengan macam pendidikan Muhammad Quthb berdasarkan ciri manusia yang baik dan oleh sistem Islam tersebut, diusahakan diterapkan di dunia nyata, yaitu keterpaduan yang lengkap, keserasian, kepositifan, realism yang idealis (Yahya, 2010).

Penerapan pendidikan multikultural, paling tidak, terhadap (rekrutmen) siswa, lembaga, program, dan kurikulum (Schechner, 1992). Penerapan pengajaran dalam pendidikan multikultural juga sebaiknya memadukan antara isu dan masalah dengan

disertai kegunaan praktis dari sebuah metode persiapan mengajar guru yang meliputi juga seluk beluk penggunaannya (Lovano-Kerr & Enid, 1977).

Secara fakta, lembaga pendidikan yang muridnya datang dari berbagai perbedaan budaya hasilnya lebih baik dibanding lembaga pendidikan yang muridnya dari persamaan budaya, seperti di Oberlin dan Ball di Amerika. Bahkan dari sisi latar belakang murid, murid yang berasal dari keluarga pekerja jauh lebih aktif dibandingkan dengan murid yang berasal dari keluarga ekonomi menengah. Selain itu, perbedaan budaya menghasilkan lulusan yang kreatif dalam bekerja, sedangkan lulusan satunya lagi cenderung materialism (Schechner, 1992).

Asosiasi perguruan tinggi Amerika untuk fakultas pendidikan telah mengembangkan, mengesahkan, dan menyebarkan kepada seluruh peserta sebuah pernyataan tentang pendidikan multikultural yaitu: tidak ada satu model Amerika. Mereka mengartikan pendidikan multikultural sebagai: pendidikan yang menghasilkan nilai plurasime budaya. Pendidikan multikultural menolak pandangan bahwa sekolah akan mencoba meleburkan perbedaan budaya atau pandangan bahwa sekolah, akan melulu, bersabar menghadapi pluralism budaya. Malahan, pendidikan multikultural menegaskan bahwa sekolah akan berorientasi menghadapi pengayaan budaya dari semua murid dan pemuda melalui program yang mengakar kepada pemeliharaan dan perluasan perbedaan budaya sebagai suatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat Amerika, dan ia menegaskan bahwa perbedaan budaya ini adalah sumber berharga yang akan dipelihara dan dikembangkan. Ia juga menegaskan bahwa umumnya institusi pendidikan akan berusaha keras untuk memelihara dan mempertinggi pluralisme budaya (Lovano-Kerr & Enid, 1977).

Aturan kampus dan universitas berkenaan dengan pengajaran guru menjadi salah satu penerapan konsep tentang pulralisme budaya di dalam program mereka. Implementasi pluralism budaya ini harus menjadi bagian integral dari pengajaran guru. Ia dibutuhkan tidak hanya mata pelajaran khusus atau pengalaman pembelajaran khusus yang melekat pada program regular juga ia dapat menyerap semua aspek dan semua level dari pengajaran guru. Untuk kebermaknaan yang sesungguhnya, kegiatan belajar mengajar multikultural bagi guru diharapkan meliputi partisipasi aktif dalam perbedaan pengalaman belajar tentang multikultural. Walaupun banyak area konten yang dapat dan siap didesain untuk memasukan partisipasi aktif ini, wilayah pendidikan seni, sejarah, telah menekankan partisipasi aktif dengan proses kebajikan dan produksi dan memiliki potensi natural yang menekankan perbedaan nilai budaya yang melekat pada bidang seni (Lovano-Kerr & Enid, 1977).

SIMPULAN

Tidak ada multikulturalisme di dalam pendidikan, utamanya di dalam pengajaran, jika muridnya tidak beragam. Karena budaya itu merupakan faktor bawaan murid, maka pengajaran multikulturalisme akan berjalan dengan sendirinya seiring dengan hadirnya perbedaan latarbelakang mereka. Begitupun, pembaharuan pendidikan Islam multikulturalis merupakan usaha modernisasi pemahaman akan perbedaan budaya

sebagai sebuah keniscayaan diawali dari latar belakang murid melalui program pengajaran dan pembaruan system penerimaan murid baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2013). Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millennium Baru. *Lentera Pendidikan*, 16(2), 196–204.
- Bush, T., & Marianne, C. (2012). *Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan*. IRCiSoD.
- Haldane, J. J. (1993). Identity, Community and the Limits of Multiculture. *Public Affairs Quarterly*, 7(3), 199–214.
- Hofstede, G. (1993). Cultural Constraints in Management Theories. *The Executive*, 7(1), 81–94.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2005). *Theories of Human Communication*. Thomson Learning Academic Resource Center.
- Lovano-Kerr, J., & Enid, Z. (1977). Multiculture Teacher Education Program in the Arts. *National Art Education Association*, 30(1), 34–38.
- Muslimah, R. H. (2010). *Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam teks mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA Kelas X* (hlm. 1–66). Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga.
- Nasution, H. (1989). *Pembaharuan dalam Islam*. UI Press.
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. *Sprouts: Working Papers on Information Systems*, 10(26). <http://sprouts.aisnet.org/10-26>
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity, transformation of an intellectual tradition*. The University of Chicago.
- Schechner, R. (1992). Multiculture at School. *The MIT Press*, 36(1), 7–9.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2), 63–77.
- Yahya, M. (2010). Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural. *Lentera Pendidikan*, 13(2), 175–191.